Analisis Good Corporate Governance (GCG) Syariah dan UU 23 Tahun 2011 terhadap Kinerja Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kota Bandung

Silvi Pitriani*, Redi Hadiyanto, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*silvipitriani446@gmail.com, redihadiyanto7@gmail.com, arif.rijal@unisba.ac.id

Abstract. This study aims to analyze sharia GCG and Law 23 of 2011 on the performance of zakat fund distribution in Bandung City Baznas. This research was conducted at BAZNAS Bandung City. The method used in this study is qualitative descriptive analysis. The data collection method in this study includes studying books, legal journals, research results, and legal documents. The results of the study show that the management of zakat distribution in BAZNAS Bandung City includes several activities, namely collection, management, utilization, and distribution. Analysis of the application of Good Governance principles in the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Bandung City, the following indicators are used: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Zakat management based on Law No. 23 of 2011, the activities include strategic planning for zakat collection, organizing structures for zakat distribution, direction on the use of zakat in accordance with the established principles, coordination between institutions involved in zakat management, as well as supervision of the use and distribution of zakat to ensure compliance and effectiveness of the program.

Keywords: *Good Corporate Governance, BAZNAS, Distribution of Zakat Funds.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis GCG syariah dan uu 23 tahun 2011 terhadap kinerja penyaluran dana zakat di baznas kota bandung. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen distribusi zakat di BAZNAS Kota Bandung meliputi beberapa kegiatan yaitu pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian. Analisis penerapan prinsip Good Governance di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung, digunakan indikator-indikator berikut: keterbukaan (transparansi), pertanggung jawaban (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), kemandirian (independensi), serta keadilan dan kesetaraan (fairness). pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, kegiatan tersebut mencakup perencanaan strategis pengumpulan zakat, pengorganisasian struktur untuk pendistribusian zakat, pengarahan terhadap penggunaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan, koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat, serta pengawasan terhadap penggunaan dan pendistribusian zakat untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas program.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, BAZNAS, Penyaluran Dana Zakat.*

A. Pendahuluan

Secara teoritis, implementasi tata kelola yang efektif pada lembaga pengelola zakat seperti BAZ dan LAZ dapat berdampak pada kepercayaan muzaki untuk mengalokasikan zakat melalui lembaga-lembaga ini. Tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga zakat, yang sering kali rentan terhadap penyalahgunaan. Peningkatan kepercayaan ini kemudian mendorong muzaki untuk berkontribusi dengan zakat mereka melalui lembaga-lembaga yang dipercayai tersebut. Dengan demikian, lembaga pengelola zakat memiliki potensi untuk lebih efektif memanfaatkan dana zakat dan mencapai tujuan utama BAZ dan LAZ, yakni mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang penting. Dalam Islam, zakat memiliki peran sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan umat, dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam proses sosialisasi dan pendayagunaan Zakat, masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung untuk mencapai tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Tujuan ini dapat dicapai melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011).

Lembaga pengelola zakat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, serta mempromosikan distribusi harta yang lebih adil. Zakat diambil dari harta orang kaya untuk diberikan kepada fakir miskin di sekitar tempat pengumpulannya, mencerminkan kontribusi kaum kaya kepada kaum miskin.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, metodologi kualitatif adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara keseluruhan dengan mengumpulkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan.[1]

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berarti bahwa penelitian ini dilakukan dengan menganalisis teori, konsep, dan undang-undang yang relevan. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai dasar untuk sistem standar. Asas, norma, peraturan, perjanjian, dan doktrin (ajaran) termasuk dalam sistem norma yang dimaksud.

Penelitian normatif ini adalah penelitian sistematis tentang hukum, dengan tujuan utamanya adalah untuk menemukan definisi atau dasar hukum.[2] Penelitian yuridis normatif menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder.

Teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian dikumpulkan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian hukum normatif terdiri dari:[3]

- a. Penelitian tentang asas-asas hukum;
- b. Penelitian tentang sistematika hukum;
- c. Penelitian tentang taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal;
- d. Perbandingan hukum

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmani Timorta Yulianti (2016), untuk menganalisis penerapan prinsip Good Governance di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung, digunakan indikator-indikator berikut: keterbukaan (transparansi), pertanggung jawaban (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), kemandirian (independensi), serta keadilan dan kesetaraan (fairness).[4]

Berikut ini adalah uraian mengenai hasil penelitian terhadap penerapan prinsip Good Governance di BAZNAS Kota Bandung:[5]

1. Transparancy (Keterbukaan)

Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip dan praktik di mana informasi dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu organisasi, pemerintah, atau lembaga dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Tujuan utama transparansi adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, mendorong partisipasi, serta membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.

BAZNAS Kota Bandung menyediakan beberapa media informasi dan komunikasi digital kepada publik sebagai bagian dari layanan transparansi dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).

Tabel 1. Media Informasi dan Komunikasi Digital BAZNAS Kota Bandung

No	Media	Portal Site
1	Website Resmi	https://kotabandung.baznas.go.id/
2	Instagram	@baznaskotabandung
3	Facebook	BAZNAS Kota Bandung
4	Email	baznaskota.bandung@ <i>baznas</i> .go.id.
6	Telp dan Fax	(0228)7356096
7	Whatsapp	08112251717

Semua informasi yang diperlukan untuk mengelola lembaga terkait pelaporan aktivitas pelaksanaan program dan keuangan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dikumpulkan dan disalurkan melalui berbagai kegiatan program yang dilaksanakan oleh Amil Zakat BAZNAS Kota Bandung. Informasi ini tersedia secara transparan dan akurat sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui media yang disebutkan di atas.

2. Accountability (Dapat dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah konsep yang mengacu pada tanggung jawab individu atau organisasi untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan cara yang transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pemerintahan, bisnis, dan organisasi lainnya, akuntabilitas berarti bahwa entitas tersebut harus bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan mereka atas keputusan, tindakan, dan hasil yang dicapai. Beberapa aspek penting dari akuntabilitas meliputi :[6]

a) Pelaporan dan Transparansi: Memberikan laporan yang jelas, tepat waktu, dan akurat tentang kegiatan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada pemangku kepentingan. Informasi ini harus dapat diakses dan dipahami oleh publik.

b) Kepatuhan terhadap Standar dan Regulasi: Mematuhi aturan, regulasi, dan standar yang berlaku, serta memastikan bahwa semua tindakan dilakukan sesuai dengan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan.

c) Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan internal dan eksternal serta evaluasi berkala untuk memastikan bahwa tujuan dan target tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Ini juga termasuk adanya mekanisme untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan.

d) Partisipasi Publik: Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan masukan, umpan balik, serta mengajukan pertanyaan.

e) Tanggung Jawab dan Konsekuensi: Mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas hasil dari tindakan yang diambil. Ini termasuk adanya konsekuensi yang jelas untuk tindakan yang tidak sesuai dengan standar atau ekspektasi yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas dalam berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga bisnis dan organisasi nirlaba..

3. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Responsibilitas adalah konsep yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Ini mencakup tanggung jawab moral dan etika untuk bertindak dengan cara yang tepat

dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Responsibilitas sering kali melibatkan kewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik dari pihak lain, seperti pemangku kepentingan, pelanggan, atau masyarakat umum.

Beberapa aspek penting dari responsibilitas meliputi :[7]

- a) Komitmen terhadap Tugas: Memastikan bahwa semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b) Etika dan Integritas: Bertindak dengan cara yang etis dan bermoral, serta menjaga integritas dalam setiap tindakan dan keputusan.
- c) Pengambilan Keputusan yang Bijaksana: Membuat keputusan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dan jangka pendek, serta kesejahteraan dari semua pihak yang terlibat.
- d) Tanggung Jawab terhadap Dampak: Mengakui dan bertanggung jawab atas dampak dari tindakan yang diambil, baik positif maupun negatif. Ini termasuk mengidentifikasi dan mengatasi konsekuensi yang tidak diinginkan.
- e) Keterlibatan dan Komunikasi: Berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan semua pemangku kepentingan, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang relevan.
- f) Peningkatan Diri dan Organisasi: Terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi melalui pembelajaran, pelatihan, dan penyesuaian proses kerja.

Responsibilitas adalah dasar dari hubungan yang saling menghormati dan terpercaya dalam berbagai konteks, baik itu dalam lingkungan kerja, komunitas, atau hubungan pribadi. Hal ini memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan didukung, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan..

BAZNAS Kota Bandung bertanggungjawab tidak hanya kepada mustahik (penerima zakat), tetapi juga kepada muzakki (para pembayar zakat). Mereka memberikan pertanggungjawaban kepada muzakki melalui laporan-laporan yang transparan, data-data yang jelas, serta laporan keuangan yang dipublikasikan secara terbuka. Keteraturan dalam memberikan laporan-laporan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kota Bandung.

Sekretaris BAZNAS Kota Bandung menyatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban kepada mustahik meliputi monitoring dan evaluasi terhadap setiap bantuan yang diberikan, khususnya bantuan yang bersifat produktif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan oleh para mustahik.

“Pertanggungjawaban kepada mustahik setelah memberikan bantuan melibatkan pendampingan dan monitoring. Setelah memberikan bantuan, BAZNAS Kota Bandung melakukan pengecekan terhadap perkembangan yang dicapai, terutama untuk bantuan yang bersifat produktif. Bantuan konsumtif biasanya habis digunakan secara langsung, sementara bantuan berupa barang, sarana prasarana (Sarpras), atau rumah membutuhkan monitoring yang lebih intensif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang telah diberikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan memberikan manfaat yang tepat kepada mustahik.”

Monitoring yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandung bertujuan untuk mengamati kemajuan serta menangani permasalahan yang muncul dengan mengantisipasi atau mencari solusinya. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, BAZNAS Kota Bandung ingin memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah disusun, dan mengukur sejauh mana perkembangan yang telah dicapai oleh para mustahik, terutama penerima bantuan modal usaha dan sarana prasarana usaha. Dengan pendekatan ini, BAZNAS Kota Bandung tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, tetapi juga memberikan bimbingan dan arahan kepada mustahik, khususnya dalam pengelolaan bantuan yang bersifat produktif. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa bantuan tersebut memberikan manfaat yang nyata dan dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan mustahik. Dengan cara ini, BAZNAS Kota Bandung berupaya mewujudkan motto mereka untuk mensejahterakan mustahik melalui pengelolaan zakat yang efektif dan berkelanjutan.

4. Independency (Kemandirian)

Independensi adalah prinsip yang mengacu pada kebebasan seseorang atau suatu entitas untuk bertindak, membuat keputusan, dan memberikan penilaian tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau intervensi dari pihak lain. Independensi sangat penting dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengambilan keputusan, penilaian profesional, dan fungsi pengawasan.[8]

Beberapa aspek penting dari independensi meliputi:

- a) Kebebasan dari Pengaruh Eksternal: Menghindari pengaruh dari pihak luar yang dapat mengganggu objektivitas dan integritas dalam pengambilan keputusan atau penilaian.
- b) Netralitas: Menjaga posisi netral dan tidak berpihak, terutama dalam konteks profesional seperti auditor, hakim, atau peneliti, untuk memastikan bahwa keputusan atau penilaian yang dibuat adalah adil dan berdasarkan fakta.
- c) Objektivitas: Berfokus pada fakta dan bukti yang ada, serta menghindari bias pribadi atau kepentingan tertentu dalam proses pengambilan keputusan atau penilaian.
- d) Kemandirian dalam Operasi: Memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi atau tugas tanpa ketergantungan pada pihak lain yang dapat mempengaruhi hasil atau kinerja.
- e) Keberanian untuk Menyuarakan Kebenaran: Mampu menyuarakan pendapat atau temuan yang benar, meskipun mungkin tidak populer atau berlawanan dengan kepentingan pihak tertentu.
- f) Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan yang Mandiri: Mampu merancang dan menerapkan kebijakan tanpa intervensi yang tidak semestinya dari pihak luar, yang dapat mengkompromikan tujuan atau nilai-nilai inti dari organisasi atau individu tersebut.

Independensi adalah fondasi yang penting dalam menjaga kepercayaan dan kredibilitas, baik dalam konteks individu maupun organisasi. Hal ini memastikan bahwa keputusan dan penilaian yang dibuat adalah jujur, adil, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang benar, tanpa adanya pengaruh yang tidak semestinya.

5. Fairness (Keadilan dan Kesetaraan)

Fairness, atau keadilan, adalah prinsip yang mengacu pada perlakuan yang setara, adil, dan tidak memihak terhadap semua individu atau kelompok. Fairness memastikan bahwa keputusan dan tindakan diambil berdasarkan kriteria yang objektif dan transparan, tanpa adanya diskriminasi, bias, atau favoritisme. Dalam berbagai konteks, fairness adalah kunci untuk membangun kepercayaan, menghormati hak-hak individu, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Beberapa aspek penting dari fairness meliputi:

- a) Kesetaraan: Memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang, status, atau karakteristik pribadi lainnya.
- b) Keterbukaan dan Transparansi: Memastikan bahwa proses pengambilan keputusan terbuka dan transparan, sehingga semua pihak memahami bagaimana dan mengapa keputusan tersebut dibuat.
- c) Tidak Diskriminatif: Menghindari perlakuan yang berbeda atau tidak adil berdasarkan faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama, usia, orientasi seksual, atau kondisi fisik.
- d) Konsistensi: Menerapkan aturan, kebijakan, dan prosedur secara konsisten kepada semua orang, sehingga tidak ada yang merasa diperlakukan dengan cara yang tidak adil.
- e) Pengakuan dan Penghargaan yang Adil: Memberikan pengakuan dan penghargaan berdasarkan kinerja dan kontribusi yang objektif, tanpa favoritisme atau bias.
- f) Keadilan Prosedural: Memastikan bahwa prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan adalah adil, termasuk memberikan hak untuk menyuarakan pendapat dan mendapatkan perlakuan yang layak.
- g) Kompensasi yang Wajar: Menyediakan kompensasi, imbalan, atau ganti rugi yang wajar dan sesuai dengan kontribusi atau kerugian yang dialami.

Fairness adalah dasar dari sistem yang adil dan etis, baik dalam lingkungan kerja, sistem hukum, pendidikan, maupun dalam masyarakat secara umum. Prinsip ini membantu menciptakan lingkungan yang menghormati hak-hak individu, mempromosikan keadilan sosial, dan mendorong kerjasama serta kepercayaan di antara berbagai pihak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Praktek manajemen zakat (distribusi zakat) Baznaz kota bandung dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:
 - a. Pengumpulan
Pada tahap ini, BAZNAZ Kota Bandung melaksanakan kegiatan pengumpulan dana yang akan dialokasikan kepada penerima sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan, seperti bantuan untuk fakir miskin, beasiswa, dukungan modal usaha, bantuan pengobatan, serta program renovasi rumah bagi fakir miskin yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.
 - b. Pengelolaan
BAZNAS Kota Bandung melakukan beberapa langkah dalam pengelolaan zakat, antara lain: a) Pembelian buku petunjuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengelolaan zakat untuk membantu pengelola memahami cara terbaik untuk mengelola zakat; b) Menyelenggarakan pelatihan UPZ, dengan harapan setiap UPZ memahami cara pengelolaan zakat; c) Pengawasan modal usaha melalui pelaporan yang terkendali untuk memaksimalkan produktifitas mustahik; dan d) Pembuatan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat).
 - c. Pendayagunaan
Strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif, terutama produk dana bergulir, yaitu Meningkatkan kualitas dana, bekerjasama dengan lembaga dan analisis kelayakan usaha.
 - d. Distribusi
Dalam hal penyaluran zakat, BAZNAS Kota Bandung memiliki lima program yang terbagi menjadi pola usaha produktif dan pola konsumtif. Program-program tersebut adalah Program Bandung Sejahtera, Program Bandung Cerdas, Program Bandung Dakwah, Program Bandung Peduli, Program Bandung Sehat.
2. Analisis kinerja penyaluran dana zakat terhadap Good Corporate Governance di Baznaz Kota Bandung dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator-indikator yaitu: keterbukaan (transparansi), pertanggung jawaban (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), kemandirian (independensi), serta keadilan dan kesetaraan (fairness).
3. Analisis UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap praktek manajemen zakat di baznaz kota bandung berdasarkan Good Corporate Governance mencakup perencanaan strategis pengumpulan zakat, pengorganisasian struktur untuk pendistribusian zakat, pengarahannya terhadap penggunaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan, koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat, serta pengawasan terhadap penggunaan dan pendistribusian zakat untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas program.

Daftar Pustaka

- [1] Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: CV Alfabeta, 2018).
- [2] Iman Jalaludin Rifa'i, "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum," *Metodologi Penelitian Hukum* 6 (2023).
- [3] Soerjono Soekanto, "Pengantar penelitian hukum," (No Title), 2006.
- [4] KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- [5] Al-Qardhawi, Y. (2004). *Manajemen Zakat Profesional*, terj. Jasmin dan Faozan. Solo: Media Insani Press.
- [6] Chotib, M., Yuswadi, H., Toha, A., & Wahyudi, E. (2018). Implementation of Good Amil Governance At Amil Zakat Institution. *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, Volume 7(Issue 1).
- [7] Governance At Amil Zakat Institution. *International Journal of Humanities and Social*

- Science Invention (IJHSSI), Volume 7(Issue 1).
- [8] Qardawi, Y. (2002). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- [9] Maharani Salma Fitriyah, Iwan Permana. Tinjauan Peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 terhadap Penyaluran Bantuan Produktif di Baznas Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 2022 Jul 8;33–40.
- [10] Franky Gantara, Arif Rijal Anshori. Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 2022 Dec 20;99–104.